

---

## **KOMPARASI KEBIJAKAN LUAR NEGERI AMERIKA SERIKAT TERHADAP PERLINDUNGAN HAK PEREMPUAN DI AFGHANISTAN DALAM PERSPEKTIF FEMINIST FOREIGN POLICY PADA ERA TRUMP DAN BIDEN**

Sayyidul Mubin\*, Firda Ainun Ula  
Universitas Gadjah Mada, Indonesia  
E-mail: [hail.sayyidul@gmail.com](mailto:hail.sayyidul@gmail.com)

***Abstract.** The protection of women's rights in Afghanistan has been a central issue in U.S. foreign policy since the 2001 invasion, with the narrative of women's empowerment often used as a moral and political justification for U.S. military intervention. This study analyzes the differences in the United States' foreign policy approach to protecting women's rights in Afghanistan in the era of Donald Trump (2017–2021) and Joe Biden (2021–2023) using the Feminist Foreign Policy (FFP) framework from Scheyer and Kumskova which includes six main indicators. This study uses a qualitative method with a literature study approach to policy documents, international organization reports, and academic literature. The results of the study show that the two governments have not comprehensively implemented the FFP principles. The Trump era tends to be oriented towards a pragmatic and militaristic approach with minimal participation of women in the diplomatic process, while the Biden era shows a stronger normative commitment through humanitarian assistance and multilateral diplomacy, but is still limited in structural implementation. These findings indicate a gap between normative commitments and policy practices in the protection of women's rights in Afghanistan.*

***Keywords:** US Foreign Policy, Women's Rights, Feminist Foreign Policy, Afghanistan*

**Abstrak.** Perlindungan hak-hak perempuan di Afghanistan telah menjadi isu sentral dalam kebijakan luar negeri AS sejak invasi 2001, dengan narasi pemberdayaan perempuan sering digunakan sebagai pembenaran moral dan politik untuk intervensi militer AS. Penelitian ini menganalisis perbedaan pendekatan kebijakan luar negeri Amerika Serikat dalam perlindungan hak-hak perempuan di Afghanistan pada era Donald Trump (2017–2021) dan Joe Biden (2021–2023) dengan menggunakan kerangka Feminist Foreign Policy (FFP) dari Scheyer dan Kumskova yang mencakup enam indikator utama. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kepustakaan terhadap dokumen kebijakan, laporan organisasi internasional, dan literatur akademik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kedua pemerintahan belum secara komprehensif mengimplementasikan prinsip FFP. Era Trump cenderung berorientasi pada pendekatan pragmatis dan militeristik dengan minimnya partisipasi perempuan dalam proses diplomasi, sementara era Biden menunjukkan komitmen normatif yang lebih kuat melalui bantuan kemanusiaan dan diplomasi multilateral, namun masih terbatas dalam implementasi struktural. Temuan ini mengindikasikan adanya kesenjangan antara komitmen normatif dan praktik kebijakan dalam perlindungan hak perempuan di Afghanistan.

**Kata kunci:** kebijakan luar negeri Amerika Serikat, hak perempuan, kebijakan luar negeri feminis, Afghanistan

\* Corresponding author

## Pendahuluan

Sejak invasi Amerika Serikat ke Afghanistan pada tahun 2001, isu perlindungan hak-hak perempuan menempati posisi penting dalam narasi kebijakan luar negeri Amerika Serikat. Wacana pemberdayaan perempuan kerap digunakan sebagai justifikasi moral dan politik untuk mendukung intervensi militer, diplomasi, dan agenda pembangunan di Afghanistan (Hunt, 2002; Ahmad, 2023). Namun, perkembangan politik Afghanistan menunjukkan bahwa narasi tersebut tidak selalu berbanding lurus dengan perlindungan yang substantif. Kembalinya Taliban ke tampuk kekuasaan pada tahun 2021 justru diikuti oleh pembatasan yang semakin ketat terhadap pendidikan, pekerjaan, mobilitas, dan partisipasi publik perempuan. Kondisi ini menunjukkan bahwa perlindungan hak-hak perempuan tidak dapat dibaca hanya dari retorika kebijakan, tetapi harus dianalisis melalui orientasi, implementasi, dan dampak nyata kebijakan luar negeri terhadap kehidupan perempuan Afghanistan (Dewi & Utari, 2022).

Dalam konteks tersebut, Afghanistan menjadi salah satu arena penting untuk menilai bagaimana kebijakan luar negeri Amerika Serikat menempatkan perempuan dalam relasi antara keamanan, diplomasi, dan kepentingan strategis negara. Pada satu sisi, Amerika Serikat sering memosisikan diri sebagai aktor yang mendukung demokrasi, hak asasi manusia, dan pemberdayaan perempuan. Pada sisi lain, berbagai keputusan strategis yang diambil di Afghanistan memperlihatkan bahwa isu perempuan dapat dinegosiasikan ketika berhadapan dengan agenda militer, stabilitas jangka pendek, atau kepentingan domestik Amerika Serikat. Karena itu, isu perlindungan perempuan Afghanistan tidak hanya relevan sebagai persoalan kemanusiaan, tetapi juga penting sebagai pintu masuk untuk membaca kontradiksi antara komitmen normatif dan praktik kebijakan luar negeri Amerika Serikat.

Pada masa Trump, kebijakan luar negeri AS terhadap Afghanistan cenderung pragmatis dan mengabaikan sensitivitas gender. Perjanjian Doha 2020, yang menjadi tonggak diplomasi antara AS dan Taliban, tidak melibatkan perempuan dalam proses negosiasi, serta tidak menyertakan jaminan eksplisit atas perlindungan hak-hak mereka (Dewi & Utari, 2022). Fokus utama adalah penarikan pasukan dan stabilitas keamanan jangka pendek, dengan mengorbankan partisipasi perempuan dan penguatan institusi gender seperti UN Women dan CEDAW. Akibatnya, di lapangan terjadi peningkatan pelanggaran hak perempuan, termasuk larangan kerja, pendidikan dan pergerakan. Penangkapan tokoh perempuan seperti Salima Mazari menjadi simbol represi sistematis (Rumadaul, 2017).

Sementara itu, era Biden memperlihatkan retorika yang lebih progresif terkait perlindungan perempuan. Pemerintahannya menegaskan komitmen untuk mendukung perempuan Afghanistan melalui bantuan kemanusiaan, terutama dalam bidang pendidikan dan kesehatan. Biden juga menggandeng aktor multilateral seperti PBB dan UN Women untuk memantau pelanggaran hak asasi manusia pasca-kekuasaan Taliban kembali. Namun, komitmen tersebut tidak sepenuhnya terealisasi secara konkret. Penarikan pasukan AS pada Agustus 2021 mengakhiri kehadiran langsung yang memungkinkan intervensi efektif terhadap pelanggaran. Akibatnya, Taliban kembali

menerapkan kebijakan represif seperti melarang pendidikan bagi perempuan di atas kelas 6 dan membubarkan Kementerian Urusan Perempuan (Dewi & Utari, 2022).

Selama rezim Taliban 2021–2023, perlindungan hak asasi perempuan di Afghanistan berlangsung secara parsial. Beberapa hak seperti akses pendidikan dasar, rasa aman, dan layanan kesehatan diakui secara terbatas sesuai tafsir Hukum Islam. Namun, banyak hak lainnya, seperti bekerja, berpartisipasi politik, berekspresi, dan menentukan cara berpakaian dibatasi secara ketat, bertentangan dengan prinsip CEDAW dan nilai-nilai keadilan dalam Islam sendiri (Wiguna et al. 2022).

Literatur juga menyoroti kecenderungan AS untuk menginstrumentalisasi isu perempuan sebagai legitimasi politik yang dapat dinegosiasikan ketika bertabrakan dengan kepentingan strategis seperti penarikan militer. Dampak struktural dari kebijakan ini terlihat pada anjloknya angka pendidikan perempuan. Data UNESCO (2017) menunjukkan 84,29% perempuan bersekolah sebelum 2021, namun angka ini merosot drastis setelah Taliban kembali berkuasa.

Afghanistan telah menjadi sebuah wilayah strategis bagi negara Amerika Serikat (AS), khususnya ketika pasca serangan 9 September yang memicu sebuah gerakan “War on Terror”. Sebagai negara yang difokuskan dalam politik luar negeri Amerika Serikat, Afghanistan memiliki beberapa sektor yang menjadi perhatian dari Amerika Serikat, yaitu permasalahan perlindungan kepada hak-hak perempuan. Isu perlindungan akan hak-hak perempuan di Afghanistan sudah menjadi perhatian utama dalam kebijakan luar negeri Amerika Serikat sejak menginvasi negara Afghanistan pada tahun 2001. Beberapa *scholars* menyatakan bahwa intensi akan perlindungan kepada hak-hak perempuan menjadi sebuah justifikasi moral dan politik untuk intervensi militer serta diplomasi Amerika Serikat di Afghanistan dari penindasan rezim Taliban (Hunt, 2002). Penggunaan narasi dan isu mengenai perempuan dalam kebijakan luar negeri AS kerap dipertanyakan, karena tendensinya lebih kearah politis daripada komitmen nyata kepada program-program pemberdayaan (Ahmad, 2023).

Secara umum, keadaan perempuan di Afghanistan tidak bisa dipisahkan dari aspek-aspek seperti budaya, sosial, hukum, serta keadaan politik domestik di Afghanistan. Secara tradisional, Afghanistan memiliki sistem masyarakat yang patriarkal dengan penempatan laki-laki dalam struktur sosial yang memiliki otoritoria yang tinggi (Innocent, 2011). Beberapa perempuan yang memang berada di wilayah rural, rentan dalam pembatasan akses pendidikan, pekerjaan, bahkan mobilitasnya sebagai manusia apabila tanpa *mahram* (kerabat laki-laki yang mendampingi). Selain itu implementasi dari sistem adat seperti *Baad* (pernikahan guna menyelesaikan sebuah permasalahan) serta pernikahan dini masih lazim dilaksanakan oleh masyarakat di wilayah rural Afghanistan. Hal ini diperparah dengan interpretasi agama yang sempit dan konservatif dalam praktik Islam dan gender di Afghanistan.

Pada rezim Taliban sebelum kedatangan Amerika Serikat di tahun 1996 hingga 2001, anak perempuan dilarang bersekolah, dan hanya diizinkan untuk mengenyam pendidikan berbasis agama. Pada tahun 2021 ketika AS keluar dari Afghanistan, Taliban kembali

mengimplementasikan hal ini, dimana anak-anak perempuan diatas 12 tahun dilarang untuk mengenyam pendidikan formal (Wang, 2022). Hal ini menjadi salah satu alasan juga mengenai kegagalan advokasi kemanusiaan dari pemerintah AS selama dua dekade di Afghanistan.

Konteks mengenai kebijakan luar negeri tidak bisa dipisahkan dari adanya individu yang memimpin sebuah negara, begitu pula dengan kebijakan luar negeri Amerika Serikat di Afghanistan. Praktik yang dilaksanakan oleh AS terhadap Afghanistan pada era Trump di tahun 2017-2021 serta era Joe Biden pada tahun 2021-2023 terdapat dinamika yang kompleks didalamnya. Penulis dalam penelitian ini ingin menguraikan secara rinci mengenai perbedaan serta persamaan yang dihadirkan oleh kedua pemimpin AS ini, terutama pada isu perlindungan hak-hak perempuan di Afghanistan.

Sejumlah penelitian sebelumnya telah membahas hubungan antara kebijakan luar negeri Amerika Serikat dan isu perempuan Afghanistan. Hunt (2002) menunjukkan bahwa hak-hak perempuan dapat dikomodifikasi secara strategis dalam kebijakan luar negeri. Ahmad (2023) juga menegaskan bahwa narasi perlindungan perempuan sering digunakan sebagai pembenaran invasi Amerika Serikat ke Afghanistan. Wang (2022) membahas bagaimana *embedded feminism* bekerja dalam kebijakan Amerika Serikat terhadap Afghanistan, sedangkan Dewi dan Utari (2022) menyoroti dampak penarikan pasukan Amerika Serikat terhadap hak asasi perempuan pasca-2021. Di sisi lain, Yawar (2023) menunjukkan adanya perubahan strategi kebijakan luar negeri Amerika Serikat di Afghanistan. Meskipun penting, studi-studi tersebut umumnya masih menekankan salah satu aspek tertentu, seperti justifikasi intervensi, perubahan strategi, atau dampak penarikan pasukan, sehingga belum memberikan pembacaan komparatif yang sistematis terhadap era Donald Trump dan Joe Biden dengan satu kerangka analisis gender yang konsisten.

Kesenjangan lain dalam literatur terletak pada kecenderungan perempuan Afghanistan diposisikan terutama sebagai korban represi, bukan sebagai aktor lokal yang memiliki pengalaman sosial yang beragam. Padahal, pengalaman perempuan Afghanistan tidak bersifat homogen. Kerentanan dan ruang gerak mereka dibentuk oleh perbedaan kelas sosial, etnis, usia, lokasi rural-urban, serta akses terhadap pendidikan, pekerjaan, dan jaringan sosial (Innocent, 2011). Dalam konteks ini, anak perempuan juga perlu ditempatkan sebagai bagian penting dari analisis, karena pembatasan pendidikan pasca-2021 tidak hanya memengaruhi hak individual, tetapi juga masa depan generasi dan reproduksi ketimpangan gender dalam jangka panjang. Oleh sebab itu, analisis yang terlalu berpusat pada negara dan elit kebijakan belum cukup untuk menjelaskan bagaimana kebijakan luar negeri benar-benar memengaruhi kehidupan perempuan dan anak perempuan Afghanistan.

Komparasi antara era Donald Trump (2017-2021) dan Joe Biden (2021-2023) menjadi relevan karena kedua periode tersebut merepresentasikan dua konfigurasi kebijakan yang berbeda dalam fase krusial konflik Afghanistan. Pemerintahan Trump lebih menonjolkan pengurangan kehadiran militer dan negosiasi dengan Taliban, terutama melalui Perjanjian Doha 2020. Sebaliknya, pemerintahan Biden menghadapi fase pasca-penarikan pasukan Amerika Serikat dan kemunduran tajam kondisi hak-hak perempuan di bawah rezim Taliban. Pembatasan periode

Biden pada 2021-2023 dalam penelitian ini dimaksudkan untuk memfokuskan analisis pada fase awal respons pemerintah Amerika Serikat setelah Taliban kembali berkuasa, yaitu ketika orientasi diplomasi, bantuan kemanusiaan, dan posisi normatif Amerika Serikat terhadap perlindungan perempuan Afghanistan tampak paling jelas.

Pemilihan komparasi dalam masa kepemimpinan Trump dan Biden memiliki *turning point* yang menarik, dimana Trump ketika menjabat fokus pada politik domestik Amerika Serikat (Tempo.co, 2018), sedangkan Joe Biden menjabat ketika Amerika Serikat secara besar-besaran menarik pasukannya dari Afghanistan. Perubahan-perubahan ini menjadi suatu fenomena yang perlu dikomparasikan, apakah agenda-agenda yang hadir dalam kompleksitas kebijakan luar negeri AS di Amerika Serikat akan tetap menempatkan misi perlindungan perempuan, atau malah dari awal memang perlindungan perempuan bukanlah sebuah isu yang penting dalam kebijakan luar negeri mereka. Perlindungan perempuan di Afghanistan menjadi sebuah refleksi nilai-nilai feminisme dan upaya *concern* terhadap hak asasi manusia yang diusung oleh masing-masing presiden.

Kepresidenan Donald Trump dimulai dengan adanya sebuah pendekatan pragmatis tetapi kontroversial. Dalam konteks kebijakan luar negeri Amerika Serikat, Trump fokus pada pengurangan kehadiran militernya di luar negeri, termasuk salah satunya di Afghanistan. Kebijakan ini menjadi kontroversial karena Trump tidak memperhatikan bagaimana dampak sosial politik yang luas, khususnya pada hak-hak perempuan di Afghanistan (Yawar, 2023). Beberapa melihat juga mengenai aspek pengurangan militer di Afghanistan sebagai indikator bahwa sebenarnya isu perlindungan perempuan hanyalah pemanis belaka dalam invasi militer AS (Wang, 2022).

Proses diplomasi yang dilaksanakan pada masa pemerintahan Trump dengan Taliban juga dinilai tidak menjadikan hak-hak perempuan sebagai sebuah prioritas dalam perundingan. Ini menjadi salah satu hal yang disayangkan oleh para pengamat feminis, karena keputusan-keputusan yang dihasilkan harusnya bisa untuk menjadi berpihak kepada perempuan (Hamidi, 2025). Nicole Widdersheim dalam artikelnya di *Human Rights Watch* menyatakan bahwa perempuan diputus keterlibatannya dalam keputusan-keputusan penting yang menyangkut perlindungan mereka, dan ini terjadi juga pada proses kesepakatan Doha di tahun 2020 (Widdersheim, 2024). Para perempuan Afghanistan juga menginginkan proses-proses perundingan perdamaian lebih inklusif, dan linier dengan semangat dari resolusi *UN Security Council 1325*.

Pada Era Joe Biden ketika menjabat sebagai Presiden Amerika Serikat, terdapat dinamika antara komitmen serta tantangan dari implementasi kebijakan luar negeri AS. Pada awal pemerintahannya Biden mendapat tekanan dari seluruh anggota senat perempuan AS untuk melindungi hak-hak perempuan di Afghanistan terutama ketika militer Amerika Serikat sudah ditarik dari operasinya di Afghanistan (rferl.org., 2021). "*Afghan women and girls need our action now. We request and look forward to a briefing from the Administration on your plan,*" ini adalah tuntutan dari para senat perempuan Amerika Serikat terhadap Biden, guna menjamin hak perempuan terlindungi di bawah rezim Taliban.

Biden serta para pejabat AS menyatakan bahwa mereka berkomitmen untuk mempertahankan upaya-upaya yang telah mereka laksanakan dalam perlindungan perempuan di Afghanistan. Beberapa upayanya seperti bantuan kemanusiaan dan diplomasi kemanusiaan yang menjadi penghormatan terhadap hak asasi manusia. Namun, upaya-upaya ini tentunya dilaksanakan karena desakan komunitas feminis di Amerika Serikat, serta dari desakan parlemen yang menyoroti pelanggaran hak asasi manusia di Afghanistan.

Meskipun *Feminist Foreign Policy* menawarkan kerangka normatif yang progresif dalam menempatkan perempuan sebagai pusat kebijakan luar negeri, pendekatan ini tidak lepas dari sejumlah keterbatasan konseptual dan praktis. Beberapa kajian menunjukkan bahwa implementasi FFP sering kali menghadapi kontradiksi ketika berhadapan dengan kepentingan strategis negara, khususnya dalam konteks negara besar seperti Amerika Serikat yang masih beroperasi dalam paradigma keamanan yang bersifat state-centric dan militeristik. Dalam praktiknya, komitmen terhadap nilai-nilai kesetaraan gender dapat tereduksi menjadi retorika politik atau instrumen legitimasi, tanpa diikuti oleh perubahan struktural dalam proses pengambilan kebijakan. Selain itu, FFP juga kerap dikritik karena kurang mempertimbangkan dinamika kekuasaan global dan keterbatasan pengaruh terhadap aktor non-negara seperti Taliban, yang tidak selalu tunduk pada norma-norma internasional. Oleh karena itu, penggunaan FFP dalam penelitian ini tidak hanya dimaksudkan sebagai alat analisis normatif, tetapi juga sebagai kerangka kritis untuk mengidentifikasi kesenjangan antara komitmen dan praktik kebijakan luar negeri Amerika Serikat terhadap perempuan Afghanistan.

Maka dari itu, artikel ini berangkat dari pertanyaan: bagaimana kebijakan luar negeri Amerika Serikat pada era Trump dan Biden dalam perlindungan hak-hak perempuan Afghanistan jika dianalisis melalui perspektif *Feminist Foreign Policy*? Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis persamaan, perbedaan, dan keterbatasan kedua era pemerintahan tersebut dalam menempatkan perempuan Afghanistan, termasuk anak perempuan, di dalam agenda keamanan, diplomasi, dan bantuan internasional. Kebaruan penelitian ini terletak pada upaya menggabungkan kajian kebijakan luar negeri Amerika Serikat dengan pembacaan gender yang lebih sistematis melalui enam indikator FFP, sekaligus menempatkan perempuan Afghanistan bukan hanya sebagai objek kebijakan, tetapi sebagai kelompok terdampak yang pengalamannya dan kebutuhannya harus menjadi pusat evaluasi. Secara akademik, artikel ini diharapkan dapat berkontribusi pada studi gender, keamanan internasional, dan politik global, khususnya dalam menjelaskan bagaimana hak-hak perempuan dapat diinstrumentalisasi ketika berhadapan dengan kepentingan strategis negara.

## Metode

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi dokumen komparatif. Creswell (2019) menjelaskan bahwa penelitian kualitatif digunakan untuk memahami dan menafsirkan makna dari suatu persoalan sosial atau kemanusiaan melalui eksplorasi data yang bersifat kontekstual. Pendekatan ini dipilih karena penelitian berfokus pada penelusuran,

pembacaan, dan penafsiran kebijakan luar negeri Amerika Serikat terhadap perlindungan hak-hak perempuan di Afghanistan pada dua periode pemerintahan yang berbeda, yaitu era Donald Trump (2017-2021) dan Joe Biden (2021-2023).

Unit analisis dalam penelitian ini adalah kebijakan luar negeri Amerika Serikat yang berkaitan dengan perlindungan hak-hak perempuan di Afghanistan. Data penelitian diperoleh melalui studi dokumen terhadap sumber primer dan sekunder. Sumber primer mencakup dokumen kebijakan, pernyataan resmi pemerintah Amerika Serikat, dokumen diplomatik, dan laporan lembaga internasional. Sumber sekunder meliputi artikel jurnal ilmiah, laporan kebijakan, dan publikasi akademik yang relevan. Sumber media massa digunakan secara terbatas untuk membantu pelacakan konteks peristiwa, namun tidak dijadikan dasar utama analisis dan diverifikasi silang dengan sumber resmi dan akademik.

Pemilihan sumber dilakukan berdasarkan tiga kriteria, yaitu relevansi, otoritas, dan kesesuaian temporal. Relevansi merujuk pada keterkaitan langsung sumber dengan isu kebijakan luar negeri Amerika Serikat, Afghanistan, dan perlindungan hak-hak perempuan. Otoritas sumber dilihat dari tingkat kredibilitas lembaga, penulis, atau media publikasinya. Sementara itu, kesesuaian temporal digunakan agar sumber yang dianalisis tetap sejalan dengan rentang waktu penelitian, yaitu 2017-2023. Dengan kriteria tersebut, data yang digunakan tidak hanya luas, tetapi juga lebih terarah dan dapat dipertanggungjawabkan secara akademik.

Analisis data dilakukan dengan teknik analisis isi kualitatif. Tahap pertama dilakukan dengan mengelompokkan data berdasarkan dua periode pemerintahan, yaitu era Trump dan era Biden. Tahap kedua dilakukan dengan mengodekan data ke dalam enam indikator *Feminist Foreign Policy* dari Scheyer dan Kumskova, yaitu *political dialogue*, *safety and wellbeing*, *empathic communities*, *inclusion and intersectionality*, *gender analysis*, dan *disarmament*. Keenam indikator tersebut dioperasionalkan sebagai alat analisis untuk menilai orientasi kebijakan, bentuk implementasi, serta dampaknya terhadap perlindungan perempuan Afghanistan.

Tahap ketiga ialah membandingkan temuan dari kedua era pemerintahan secara sistematis untuk mengidentifikasi persamaan, perbedaan, dan keterbatasannya. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya mendeskripsikan kebijakan, tetapi juga mengevaluasi sejauh mana kebijakan luar negeri Amerika Serikat pada era Trump dan Biden sejalan atau tidak sejalan dengan prinsip-prinsip *Feminist Foreign Policy*. Untuk memperkuat keabsahan analisis, penelitian ini menggunakan triangulasi sumber dengan membandingkan dokumen resmi, laporan internasional, dan literatur akademik yang relevan.

## Hasil dan Pembahasan

Kebijakan luar negeri Amerika Serikat terhadap perlindungan hak-hak perempuan di Afghanistan merupakan hal yang dinamikanya tidak bisa ditentukan dengan parameter yang sederhana. Kebijakan yang dikeluarkan pada periode Trump di tahun 2017 hingga tahun 2021

tentu berbeda dengan pendekatan yang dilaksanakan oleh Joe Biden ketika dia menjabat sebagai presiden pada tahun 2021 hingga tahun 2023. Penulis akan menggunakan pendekatan Feminist Foreign Policy (FFP) dalam menganalisis upaya-upaya kebijakan luar negeri kedua presiden Amerika Serikat ini.

*Feminist Foreign Policy* bukan sekadar tentang “menambahkan perempuan kedalam kebijakan”, tetapi menggugat struktur patriarkal dalam sistem keamanan internasional, menggeser fokus dari kekuasaan negara ke kesejahteraan individu dan membentuk solidaritas transnasional berbasis empati dan keadilan sosial. Menurut Scheyner dan Kumskova (2019), FFP memiliki enam indikator utama yang dapat digunakan untuk mengukur efektivitas kebijakan luar negeri dalam mendukung hak-hak perempuan, yaitu: (1) Political Dialogue; (2) Safety and Wellbeing; (3) Emphatic Communities; (4) Inclusion & Intersectionality; (5) Gender Analysis (6) Disarmament. Keenam indikator ini memberikan kerangka kritis untuk menilai sejauh mana kebijakan luar negeri AS, baik di era Trump maupun Biden, benar-benar berpihak pada perempuan Afghanistan.

Dengan menggunakan kerangka tersebut, analisis terhadap kebijakan Trump dan Biden akan membantu menganalisis perbedaan mendasar, tidak hanya dalam strategi implementatif, tetapi juga dalam komitmen normatif terhadap prinsip-prinsip kesetaraan gender dan keadilan sosial transnasional.

Tabel 1. Indikator FFP

No	Indikator	Penjelasan Konseptual	Pertanyaan Kunci
1	Political Dialogue	Menolak solusi militeristik, menekankan dialog sebagai cara menyelesaikan konflik, termasuk dalam diplomasi, perdagangan, dan resolusi konflik.	Apakah AS lebih memilih diplomasi dan negosiasi inklusif daripada solusi bersenjata?
2	Safety and Wellbeing	Menggeser definisi “keamanan” dari pertahanan negara ke keselamatan dan kesejahteraan individu, termasuk akses layanan dasar, perlindungan sipil, dan non-diskriminasi.	Apakah kebijakan AS menjamin keselamatan perempuan dari kekerasan struktural dan konflik?
3	Empathic Communities	Membangun solidaritas antarnegara yang didasarkan pada empati, bukan kepentingan nasional semata.	Apakah AS menunjukkan kepedulian lintas batas terhadap hak perempuan, atau hanya melindungi kepentingan nasionalnya?
4	Inclusion & Intersectionality	Partisipasi bermakna dari kelompok rentan dan suara lokal, bukan hanya keterwakilan simbolik.	Apakah perempuan Afghanistan diikutsertakan dalam perumusan solusi dan kebijakan?
5	Gender Analysis	Menggunakan analisis kekuasaan berbasis gender untuk membongkar dominasi maskulin dalam kebijakan luar negeri.	Apakah AS melakukan refleksi struktural tentang dampak gender dari kebijakannya?
6	Disarmament	Menolak logika keamanan berbasis senjata dan menyerukan pelucutan senjata sebagai jalan menuju perdamaian.	Apakah AS mengupayakan pelucutan senjata atau justru memperkuat militerisme di wilayah konflik?

Berdasarkan tabel 1, parameter yang disebutkan oleh Scheyner dan Kumskova (2019), terdapat enam indikator dalam Feminist Foreign Policy, yaitu Political Dialogue, Safety and Wellbeing, Emphatic Communities, Inclusion and Intersectionality, Gender Analysis, dan Disarmament. Keenam indikator ini menjadi penting dalam perumusan kebijakan luar negeri yang bersandar pada perlindungan hak-hak manusia, khususnya pada perempuan. Apakah Amerika Serikat sebagai sebuah negara menggunakan pendekatan ini dalam kebijakan luar negerinya, khususnya yang berhubungan dengan negara Afghanistan ?.

Pertama ialah Political Dialogue, indikator ini mengacu pada pendekatan yang menolak solusi militeristik dan menekankan dialog sebagai cara utama menyelesaikan konflik. Indikator ini mengukur sejauh mana suatu negara lebih memilih diplomasi dan negosiasi inklusif ketimbang solusi bersenjata, dengan penekanan khusus pada keterlibatan bermakna semua pihak, termasuk perempuan dan kelompok marginal (Kumskova, 2019). FFP menekankan pentingnya negosiasi inklusif yang melibatkan kelompok marginal, bukan hanya aktor negara atau elite politik.

Dalam konteks perjanjian Doha (2020), ketidakhadiran perempuan dalam proses perundingan menjadi kegagalan utama dalam menerapkan prinsip ini. Pada era Trump, proses diplomasi dengan Taliban (Doha Agreement 2020) tidak melibatkan perempuan Afghanistan, dan isu hak-hak perempuan tidak menjadi prioritas dalam perundingan (Gul, 2024). Pada era Biden, meski ada tekanan dari senat perempuan AS untuk memastikan perlindungan perempuan pasca penarikan pasukan, implementasi dialog inklusif tetap lemah (ODonnell, 2021). Hak-hak perempuan tidak menjadi agenda utama dalam negosiasi dengan Taliban.

Kedua, yang ditekankan oleh Scheyner dan Kumskova ialah Safety and Wellbeing, dimana dalam hal ini kebijakan luar negeri perlu menggeser fokus dari keamanannya. Pergeseran ini dari sekadar pertahanan negara, menjadi perlindungan akan keselamatan dan kesejahteraan individu, khususnya perempuan dan kelompok-kelompok yang rentan. Perlindungan akan perempuan dan kelompok rentan juga mencakup akan akses akan layanan kebutuhan dasar, perlindungan kekerasan, serta tidak adanya diskriminasi (Kumskova, 2019).

Setelah penarikan pasukan AS, perempuan Afghanistan kembali menghadapi pembatasan berat, seperti larangan sekolah dan bekerja di bawah rezim Taliban, menandakan lemahnya jaminan keselamatan dan kesejahteraan perempuan (Afzal, 2021). Biden menyatakan komitmen untuk mendukung hak-hak dasar perempuan dan anak perempuan Afghanistan, namun realisasi di lapangan masih sangat terbatas

Indikator ketiga yang ditekankan dalam FFP ialah Emphatic Community. Indikator ini menuntut solidaritas lintas batas dan kebijakan luar negeri yang didasarkan pada empati, bukan hanya kepentingan nasional semata. Baik di era Trump maupun Biden, kebijakan AS lebih berfokus pada kepentingan domestik dan agenda politik nasional dibandingkan solidaritas nyata terhadap perempuan Afghanistan (Coalition for a Feminist Foreign Policy, 2023). Bantuan kemanusiaan diberikan, namun tidak disertai perubahan struktural yang berpihak pada perempuan.

Keempat, (Kumskova, 2019) menggarisbawahi mengenai inclusion & intersectionality. Indikator ini menuntut partisipasi bermakna dari kelompok rentan, khususnya perempuan lokal, dalam perumusan kebijakan dan solusi, bukan sekadar keterwakilan simbolik. Dalam semua fase transisi Afghanistan pasca penarikan pasukan, perempuan hampir tidak pernah dimasukkan dalam forum-forum strategis atau diberi ruang untuk merumuskan agendanya sendiri. Proses perdamaian dan penarikan pasukan AS tidak melibatkan perempuan Afghanistan secara signifikan. Dalam perundingan penting seperti Doha Agreement, perempuan tidak diberi ruang untuk berpartisipasi (Gul, 2024). Pemerintahan Biden memang menampung tekanan dari kelompok perempuan AS, namun partisipasi perempuan Afghanistan dalam pengambilan keputusan tetap minim (Widdersheim, 2024). Selain itu, pendekatan AS juga gagal dalam memperhatikan keragaman identitas perempuan, seperti minoritas Hazara, perempuan penyandang disabilitas, atau mereka yang berasal dari daerah rural. Kurangnya pendekatan interseksional ini menunjukkan bahwa inklusi yang dilakukan, jika pun ada, bersifat homogen dan tokenistik. FFP justru menekankan pentingnya mendengarkan pengalaman spesifik berbagai kelompok perempuan yang berbeda, bukan menyamaratakan solusi.

Gender Analysis menjadi indikator kelima dari Feminist Foreign Policy, dimana Indikator ini mensyaratkan bahwa setiap analisis kebijakan luar negeri harus dianalisis dari sudut pandang: siapa yang diuntungkan, siapa yang dirugikan, bagaimana relasi kuasa bekerja dampak kebijakan terhadap perempuan. Dalam praktiknya, baik Trump maupun Biden tidak menggunakan analisis ini secara sistemik dalam kebijakan Afghanistan (Mosamim & Villeneuve, 2024). Keputusan politik seperti pengurangan pasukan, pengakuan terhadap Taliban atau pembekuan dana bantuan tidak pernah diuji secara terbuka mengenai dampaknya terhadap perempuan. Tidak ada bukti kuat bahwa AS melakukan refleksi struktural berbasis gender dalam kebijakan Afghanistan, baik di era Trump maupun Biden (Coalition for a Feminist Foreign Policy, 2022). Fokus tetap pada keamanan negara, bukan pada dampak gender dari kebijakan luar negeri. Kebijakan dilakukan dengan kerangka makro “keamanan nasional”, sementara implikasinya terhadap perempuan hanya dibahas secara normatif dalam pidato, bukan menjadi bagian analisis risiko kebijakan.

Terakhir, indikator terkait *disarmament* dalam FFP, yang menolak pendekatan militer terhadap keamanan dan sebaliknya mengadvokasi perlucutan senjata sebagai jalan menuju perdamaian yang berkelanjutan. Pelucutan senjata mestinya bukan sekadar mengurangi kehadiran militer, tapi sebagai upaya membangun keamanan jangka panjang yang berbasis pada keadilan dan non kekerasan. Selama pemerintahan Trump, ada pengurangan nyata dalam kehadiran militer AS di wilayah tertentu, termasuk Afghanistan. Namun, pengurangan ini tidak dilakukan dalam kerangka perlucutan senjata yang bertujuan untuk meningkatkan keamanan perempuan. Sebaliknya, sebagian besar didorong oleh kepentingan politik domestik di Amerika Serikat, tanpa memprioritaskan implikasi jangka panjang untuk perdamaian atau keamanan yang sensitif gender.

Di bawah pemerintahan Biden, penarikan pasukan penuh dari Afghanistan dilakukan. Namun, mirip dengan pemerintahan sebelumnya, tindakan ini gagal memasukkan langkah-langkah yang memadai untuk memastikan keselamatan dan perlindungan perempuan setelah keluarnya AS.

Kurangnya pendekatan strategis dan berdasarkan informasi feminis untuk pelucutan senjata dan stabilisasi pasca-konflik menyebabkan memburuknya kondisi bagi perempuan Afghanistan, membuat mereka lebih rentan setelah kebangkitan Taliban. Baik di era Trump maupun Biden, pengurangan militer AS tidak diiringi dengan program pelucutan senjata internal di Afghanistan, pembentukan institusi non-militer untuk keamanan sipil, atau penguatan aktor perempuan dalam proses pelucutan konflik. Bahkan AS tetap menyalurkan bantuan militer ke mitra-mitra strategis di wilayah lain, menandakan bahwa paradigma militeristik masih menjadi tulang punggung kebijakan luar negeri AS. Dalam konteks Afghanistan, penarikan militer tanpa strategi stabilitas jangka panjang dan sensitif gender justru membuka ruang bagi Taliban untuk mengkonsolidasikan kekuatan berbasis kekerasan.

Tabel 2. Rangkuman Anggaran AS untuk Afghanistan 2018-2021

Tahun	Total USD (dalam juta)
2018	36.015
2019	38.502
2020	39.502
2021	34.071

Sumber:

[https://comptroller.defense.gov/Portals/45/documents/Section1090Reports/Estimated\\_Cost\\_to\\_Each\\_U.S.\\_Taxpayer\\_of\\_Each\\_of\\_the\\_Wars\\_in\\_Afghanistan,\\_Iraq\\_and\\_Syria\\_dated\\_June\\_2022.pdf](https://comptroller.defense.gov/Portals/45/documents/Section1090Reports/Estimated_Cost_to_Each_U.S._Taxpayer_of_Each_of_the_Wars_in_Afghanistan,_Iraq_and_Syria_dated_June_2022.pdf)

Berdasarkan tabel 2, selama pemerintahan Trump, Amerika Serikat menghabiskan rata-rata 35 hingga 40 miliar dollar per tahun untuk perang di Afghanistan. Sebagian besar anggaran ini, sekitar 13 miliar dollar per tahun dan dialokasikan untuk menutupi operasi militer AS di negara itu, termasuk pengerahan pasukan, misi tempur, dukungan udara, dan logistik operasional. 5 miliar dollar lainnya digunakan untuk mendukung Afghan National Security Forces (ANSF), yang mencakup pelatihan, perlengkapan, dan pembayaran personel militer dan polisi Afghanistan.

Sisa pengeluaran tahunan, sekitar \$27 miliar, disalurkan ke dalam dukungan logistik, infrastruktur, dan program bantuan ekonomi. Di antaranya, sekitar \$ 780 juta per tahun secara khusus diarahkan untuk bantuan pembangunan ekonomi, yang bertujuan untuk mempromosikan stabilitas dan meningkatkan kondisi kehidupan di Afghanistan. Perincian ini menyoroti sifat multifaset dari keterlibatan A.S. di kawasan ini, menggabungkan upaya militer dengan investasi jangka panjang dalam pembangunan kembali kelembagaan dan ekonomi Afghanistan.

Data anggaran pada masa pemerintah Donald Trump menunjukkan kebijakan luar negeri Amerika Serikat terhadap Afghanistan sangat dipenuhi oleh pendekatan yang pragmatis dan militeristik. Fokus yang menjadi perhatian besar ialah operasi militer, pelatihan pasukan, serta dukungan logistik. sementara isu-isu sosial seperti perlindungan hak-hak perempuan dan kelompok rentan nyaris tidak mendapat perhatian berarti. Hal ini tercermin dari minimnya program-program pemberdayaan perempuan yang didanai, serta pemotongan anggaran pada bantuan ekonomi dan pendidikan yang sebelumnya mendukung kelompok rentan di Afghanistan.

Selain itu, dalam proses-prose upaya diplomasi dan negosiasi yan dilaksanakan oleh pemerintahan Trump, seperti pada Doha Agreement di tahun 2020 tidak mengangkat isu-isu akan

perlindungan hak-hak perempuan. Perjanjian yang berhasil diselenggarakan mengandung empat bagian yang mana semuanya hanya berfokus pada hal-hal materialistik, seperti penarikan pasukan, gencatan senjata, pengelolaan sumber daya, dan mekanisme *ceasefire* (Doha Agreement, 2020). Judul perjanjian “Agreement for Bringing Peace to Afghanistan between the Islamic Emirate of Afghanistan which is not recognized by the United States as a state and is known as the Taliban and the United States of America” nampaknya belum bisa membawa perdamaian (*peace*) pada perempuan-perempuan dan kelompok rentan di Afghanistan.

Para pengamat feminis menilai bahwa narasi perlindungan perempuan yang kerap digunakan pemerintah AS lebih bersifat politis dan simbolik, bukan sebagai komitmen nyata untuk memperbaiki kondisi perempuan di Afghanistan. Keputusan-keputusan strategis yang diambil selama era Trump, seperti pengurangan kehadiran militer tanpa memperhatikan dampak sosial-politik, semakin memperkuat anggapan bahwa perlindungan perempuan hanya menjadi pemanis dalam kebijakan luar negeri AS

Dampak dari kebijakan yang sangat fokus pada aspek militer ini adalah semakin rentannya posisi perempuan dan kelompok rentan di Afghanistan, terutama setelah Taliban kembali berkuasa. Banyak program bantuan dan perlindungan yang dihentikan, sehingga perempuan kehilangan akses terhadap pendidikan, perlindungan hukum, dan kesempatan ekonomi. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa selama era Trump, anggaran dan kebijakan luar negeri AS di Afghanistan sangat berorientasi pada kepentingan militer dan keamanan negara, sementara isu perempuan dan kelompok rentan tidak menjadi prioritas substansial dalam agenda kebijakan luar negeri Amerika Serikat.

Berbeda dengan Trump, penulis akan melihat bagaimana Biden dalam pengaturan anggarannya kepada Afghanistan, jumlahnya tidak akan sebesar pemerintahan Trump, karena Amerika Serikat sudah menarik pasukan militernya secara berkala di saat Joe Biden menjabat sebagai presiden. Berikut tabel alokasi bantuan Amerika Serikat untuk Afghanistan pada tahun 2021 hingga tahun 2023, data ini diambil penulis dari pencial Inspector General for Afghanistan Reconstruction (SIGAR), lihat tabel 3.

Tabel 3. Bantuan Amerika Serikat untuk Afghanistan 2021-2023

Tahun	Jumlah (Juta Dollar)	Sumber Dana Utama
2021	1.138	USAID/AFG
2022	1.381	BHA
2023	518	INL, PM/WRA, PRM

Sumber:

<https://www.sigar.mil/Portals/147/Files/Reports/Audits-and-Inspections/Performance-Audits/SIGAR-25-16-AR.pdf>

Joe Biden pada pemerintahannya, mulai memperhatikan bantuan-bantuan pada perempuan dan anak-anak. Hal ini tercermin dari USAID (U.S. Agency for International Development) yang pada tahun 2022 mengumumkan komitmen mereka untuk menggelontorkan dana 30 juta US Dollar untuk mendukung program sosialisasi *gender equality* dan *women empowerment* di

Afghanistan (U.S Mission to Afghanistan, 2022). Pernyataan dari pemerintah Amerika Serikat mulai memperhatikan aspek-aspek ketidakadilan yang menimpa perempuan-perempuan di Afghanistan, khususnya kekerasan berbasis gender yang dialami oleh mereka.

*“The Taliban have sharply restricted the most fundamental human rights for Afghan women and girls. Many women and girls have been instructed by the Taliban to stay at home. Women have not been allowed to work—except in certain professions, such as health. In most provinces, girls have not been permitted to attend school beyond the sixth grade, and women attending university face significant harassment. Violence against women and girls overall has increased. Female human rights defenders and journalists are targeted and threatened by the Taliban for speaking up for their freedoms, and the Taliban has increasingly restricted the space for women-led civil society organizations to operate freely and independently.”* (U.S Mission to Afghanistan, 2022).

Akan tetapi, tantangan akan selalu hadir dalam implementasi kebijakan luar negeri Amerika Serikat, khususnya dalam program-program yang menysasar pada perlindungan hak-hak perempuan di Afghanistan. Taliban pada tahun 2022 melarang para perempuan untuk bekerja di lembaga-lembaga yang mendapatkan bantuan internasional (Farzan, 2022). Hal ini tentu menghambat distribusi bantuan dan layanan kepada para perempuan serta kelompok rentan di Afghanistan.

Selain tantangan, pendekatan ini pragmatis karena keberhasilannya akan sangat bergantung kepada bagaimana Taliban mengakomodasi kebijakan domestik mereka. Komitmen Amerika Serikat hanya sebatas pemberian bantuan internasional dan perjuangan melalui mitra NGO perempuan mereka di Afghanistan (Dadras, et.al, 2022). Namun, kemampuannya hanya sampai batas tersebut sehingga efektivitasnya terbatas oleh aktor eksternal, yaitu Taliban.

Namun demikian, meskipun pendekatan Biden tidak lagi mengedepankan operasi militer, alokasi bantuan yang ada masih terbatas dalam hal daya jangkau dan efektivitas, terutama jika dilihat dari perspektif Feminist Foreign Policy (FFP). Bantuan yang diberikan lebih banyak disalurkan melalui lembaga internasional seperti PBB atau NGO internasional, dan belum secara sistematis diarahkan untuk membangun struktur yang memperkuat posisi perempuan secara jangka panjang, seperti dukungan hukum, pelatihan kepemimpinan dan rekonstruksi institusional yang peka gender.

Minimnya kontrol langsung pemerintah AS terhadap distribusi bantuan, karena risiko politik dan keamanan di bawah kendali Taliban, menjadi tantangan serius dalam memastikan bahwa bantuan benar-benar menjangkau kelompok perempuan yang paling terdampak. Selain itu, tidak adanya kerangka monitoring dan evaluasi berbasis gender membuat sangat sulit untuk mengukur dampak riil bantuan terhadap perlindungan hak-hak perempuan. Argumentasi-argumentasi yang dihadirkan oleh penulis akan penulis rangkum dalam tabel komparatif, mengenai kebijakan luar negeri Amerika Serikat pada masa kedua presiden tersebut. Berikut kurasinya pada tabel 4.

Tabel 4. Analisis Era Trump vs Biden

Aspek	Era Trump (2017-2021)	Era Biden (2021-2023)
Fokus Kebijakan	Pengurangan militer, diplomasi dengan Taliban, minim isu gender	Penarikan pasukan, tekanan senat perempuan, bantuan kemanusiaan
Peran Perempuan	Tidak dilibatkan dalam perundingan damai (misal: Doha Agreement)	Tekanan untuk perlindungan, tapi implementasi masih terbatas
Komitmen FFP	Tidak menasar akar patriarki, logika keamanan negara dominan	Komitmen retorik, namun belum sistemik dan partisipatif
Respons Internasional	Kritik dari pengamat feminis dan masyarakat sipil	Tuntutan dari komunitas internasional dan senat AS

Sumber : Analisis Penulis

Di sisi lain, pendekatan Biden juga memperlihatkan elemen retorik FFP, seperti penekanan dalam pidato publik mengenai pentingnya hak-hak perempuan. Namun, ketidaksesuaian antara komitmen normatif dan realisasi kebijakan menunjukkan bahwa pendekatan ini masih bersifat simbolik dan belum transformatif. Dibandingkan era Trump yang sangat militeristik, pemerintahan Biden memang menunjukkan pergeseran arah, tetapi belum sepenuhnya mewujudkan prinsip inklusif dan keadilan sosial seperti yang diamanatkan dalam indikator-indikator FFP.

## Penutup

Penelitian ini menunjukkan bahwa kebijakan luar negeri Amerika Serikat terhadap perlindungan hak-hak perempuan di Afghanistan pada era Donald Trump (2017–2021) dan Joe Biden (2021–2023) sama-sama belum memenuhi prinsip Feminist Foreign Policy (FFP) secara komprehensif, meskipun keduanya menempuh pendekatan yang berbeda. Era Trump ditandai oleh orientasi militeristik dan pragmatis yang memarginalkan isu gender, terutama melalui minimnya pelibatan perempuan dalam proses diplomasi seperti Doha Agreement 2020. Sementara itu, era Biden memperlihatkan pergeseran ke arah komitmen normatif dan pendekatan humaniter, namun implementasinya tetap terbatas dan belum mampu menciptakan perubahan struktural yang berkelanjutan bagi perempuan Afghanistan.

Secara komparatif, kegagalan paling menonjol pada kedua era terletak pada indikator *inclusion & intersectionality* serta *gender analysis*, di mana perempuan Afghanistan tidak dilibatkan secara bermakna dalam proses perumusan kebijakan, serta tidak adanya evaluasi sistematis terhadap dampak kebijakan berbasis gender. Hal ini menunjukkan bahwa kebijakan luar negeri AS masih didominasi oleh paradigma keamanan negara (*state-centric security*), sehingga perlindungan perempuan cenderung bersifat simbolik dan instrumental, bukan substantif.

Temuan ini berkontribusi pada kajian gender dan hubungan internasional dengan menegaskan bahwa komitmen terhadap perlindungan perempuan dalam kebijakan luar negeri sering kali berada dalam ketegangan dengan kepentingan strategis negara. Implikasinya, kegagalan implementasi FFP tidak hanya berdampak pada perempuan, tetapi juga pada anak perempuan, khususnya dalam akses pendidikan, keamanan, dan keberlanjutan sosial di Afghanistan.

Penelitian ini memiliki keterbatasan pada penggunaan data sekunder serta minimnya representasi langsung suara perempuan Afghanistan dalam analisis. Oleh karena itu, penelitian selanjutnya disarankan untuk mengkaji lebih dalam mengenai agensi perempuan lokal, efektivitas program bantuan berbasis gender, serta dampak jangka panjang kebijakan internasional terhadap kehidupan perempuan dan anak perempuan di wilayah konflik.

### Daftar Pustaka

- Afzal, M. (2021, November 9). Biden was wrong on Afghanistan. Retrieved from <https://www.brookings.edu/articles/biden-was-wrong-on-afghanistan/>
- Ahmad, P. T. (2023). Use of women's rights as a justification of invasion: An evaluation of the U.S. invasion of Afghanistan in 2001. *Kardan Journal of Social Sciences and Humanities*, 6(2), 1-13. <https://doi.org/10.31841/KJSSH-6.2-2023-64>
- Coalition for a Feminist Foreign Policy. (2022). *Feminist foreign policy in the United States: A scorecard on the Biden-Harris Administration's first year*. Washington, DC: International Center for Research on Women.
- Coalition for a Feminist Foreign Policy. (2023). *Toward a feminist foreign policy in the United States: A midterm review of the Biden-Harris Administration*.
- Creswell, J. W. (2019). *Research design: Pendekatan metode kualitatif, kuantitatif, dan campuran*. Yogyakarta: Pustaka Belajar.
- Dadras, O., Nakayama, T., Kihara, M., Ono-Kihara, M., & Dadras, F. (2022). Intimate partner violence and unmet need for family planning in Afghan women: the implication for policy and practice. *Reproductive Health*, 19(1). <https://doi.org/10.1186/s12978-022-01362-5>
- Dewi, K. M. C., & Utari, A. A. S. (2022). Dampak penarikan pasukan Amerika dari Afghanistan terhadap hak asasi manusia khususnya hak perempuan. *Jurnal Kertha Wicara*, 11(4), 832-844.
- Doha Agreement. (2020). *Agreement for bringing peace to Afghanistan*. Doha, Qatar.
- Farzan, A. (2022, December 25). Afghanistan: Taliban ban women from working for NGOs. Retrieved from <https://www.bbc.com/news/world-asia-64086682>
- Gul, A. (2024, June 28). Trump, Biden spar over Afghan exit; rights crisis goes unmentioned. Retrieved from <https://www.voanews.com/a/trump-biden-spar-over-afghan-exit-rights-crisis-goes-unmentioned/7677732.html>
- Hunt, K. (2002). The strategic co-optation of women's rights. *International Feminist Journal of Politics*, 4(1), 116-121. <https://doi.org/10.1080/14616740110108749>
- Kumskova, V. S. (2019). Feminist foreign policy. *Journal of International Affairs*, 72(2), 57-76. Retrieved from <https://www.jstor.org/stable/10.2307/26760832>
- Mosamim, P., & Villeneuve, J. (2024). 75 Years of women representation in Afghanistan: Looking back to look forward. *Public Administration and Development*, 44(4), 262-279. <https://doi.org/10.1002/pad.2043>
- ODonnell, L. (2021, March 30). Women cut out of the Afghan peace process: Two decades of progress are threatened by the Taliban return—and a hasty U.S. exit. Retrieved from <https://foreignpolicy.com/2021/03/30/afghanistan-women-taliban-peace-talks-biden/>
- rferl.org. (2021, November 5). All female U.S. senators urge Biden to protect Afghan women and

- girls following military pullout. Retrieved from <https://www.rferl.org/a/us-senators-biden-protect-afghan-women/31547121.html>
- Rumadaul, F. A. (2017, April). Peran United Nations Women dalam menanggulangi diskriminasi terhadap perempuan di Afghanistan. *Global Political Studies Journal*, 1(1). <https://doi.org/10.34010/gpsjournal.v1i1.2136>
- Tempo.co. (2018, December 21). Presiden Trump berencana tarik pasukan militer dari Afghanistan. Retrieved from <https://www.tempo.co/internasional/presiden-trump-berencana-tarik-pasukan-militer-dari-Afghanistan-786701>
- U.S Mission to Afghanistan. (2022, August 12). United States announces \$30 million commitment to advance women and girls' rights in Afghanistan. Retrieved from [https://af.usembassy.gov/united-states-announces-30-million-commitment-to-advance-women-and-girls-rights-in-afghanistan/?utm\\_source=chatgpt.com](https://af.usembassy.gov/united-states-announces-30-million-commitment-to-advance-women-and-girls-rights-in-afghanistan/?utm_source=chatgpt.com)
- Veranda, C., & Achmad, Y. (2024, April). Penegakan nilai-nilai CEDAW dalam kebijakan Taliban terhadap perempuan Afghanistan tahun 2021-20. *Diversi Jurnal Hukum*, 10(1). <https://ejournal.uniska-kediri.ac.id/index.php/Diversi>
- Wang, K. (2022). Exploring the impact of embedded feminism on U.S. foreign policy towards Afghanistan in the late 20th and early 21st centuries. *Journal of Education Humanities and Social Sciences*, 6, 15-23. <https://doi.org/10.54097/ehss.v6i.4035>
- Widdersheim, N. (2024, June 25). Joe Biden isn't doing enough to empower women in world diplomacy. Retrieved from <https://www.hrw.org/news/2024/06/25/joe-biden-isnt-doing-enough-empower-women-world-diplomacy>
- Yawar, M. E. (2023). Changing the US foreign policy strategy in the region and Afghanistan. *Akademik Tarih ve Düşünce Dergisi*, 10(6), 677-694. Retrieved from <https://orcid.org/0000-0003-3198-5212>